



Marwah dan Wibawa: Analisis Nilai Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Tradisional Melayu

Hermandra^{1*}, Elmustian², Elvira³

^{1,2,3} Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Riau

*Penulis Korespondensi: hermandra@lecturer.unri.ac.id, elmustian@lecturer.unri.ac.id,
elviraspd78@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the leadership ethics and dignity of Malay leaders. The concept of Malay leadership is constructed as a trust (amanah) based on the integration of customs with Islamic principles. A leader is depicted as a figure who guides the people, motivates individuals and groups to achieve goals safely and sustainably for the success of the region. Therefore, a leader is required to possess intelligence, role-model qualities, honesty, and the capacity to maximize the potential of society. The approach applied in this study is descriptive through literature review. The analysis focuses on the interpretation of available sources and data by referring to relevant theories and concepts from the literature related to the topic of discussion. The main findings affirm that the preservation of values and culture is a crucial element for maintaining the integrity and civilization of a nation. Historical records note that Malay culture served as the foundation for the formation of civilization (tamadun) in various regions of the archipelago to the present day. Malay society strongly emphasizes individual conduct in determining one's position in society. The development of Malay civilization and culture depends on the revitalization of noble values born from the synthesis of custom and religious teachings as the core of development. A leader must reflect the characteristics of amanah (trustworthiness), siddiq (truthfulness), fathonah (intelligence), and tabligh (communication), considering the responsibilities entrusted to him. The absence of amanah has the potential to cause abuse of authority for improper purposes. The Prophet Muhammad (PBUH) emphasized the necessity of safeguarding the trust of leadership because accountability will be demanded in this world and the hereafter. Thus, the revitalization of leadership rooted in custom (adat) and Islamic law (syarak) is essential to maintain the relevance, trust, and cultural identity of the Malays amidst the dynamics of the era.*

Keywords: *Leadership Ethics, Dignity of Malay Leadership*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika kepemimpinan serta martabat pemimpin Melayu. Konsep kepemimpinan Melayu dikonstruksikan sebagai amanah yang didasarkan pada integrasi adat istiadat dengan prinsip-prinsip Islam. Pemimpin digambarkan sebagai figur yang membimbing rakyat, memotivasi individu maupun kelompok guna mencapai tujuan secara aman dan berkelanjutan demi keberhasilan wilayah. Oleh karena itu, pemimpin diwajibkan memiliki kecerdasan, keteladanan, kejujuran, serta kapasitas untuk memaksimalkan potensi masyarakat. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini bersifat deskriptif melalui kajian pustaka. Analisis difokuskan pada interpretasi sumber dan data yang tersedia dengan merujuk pada teori serta konsep relevan dari literatur terkait topik pembahasan. Temuan utama menegaskan bahwa pelestarian nilai dan budaya merupakan elemen krusial untuk mempertahankan integritas serta peradaban suatu bangsa. Catatan sejarah mencatat budaya Melayu sebagai fondasi pembentukan tamadun di berbagai wilayah Nusantara hingga masa kini. Masyarakat Melayu sangat menekankan perlakuan individu dalam menentukan posisinya di masyarakat. Pembinaan peradaban dan budaya Melayu bergantung pada revitalisasi nilai luhur yang lahir dari sintesis adat dan ajaran agama sebagai inti pembangunan. Pemimpin wajib mencerminkan sifat amanah, siddiq, fathonah, dan tabligh mengingat tanggung jawab yang diembannya. Ketiadaan amanah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tidak patut. Nabi Muhammad SAW menekankan perlunya menjaga amanah kepemimpinan karena akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Dengan demikian, revitalisasi kepemimpinan yang berakar pada adat dan syarak esensial untuk menjaga relevansi, kepercayaan, serta identitas budaya Melayu di tengah dinamika zaman.

Kata kunci: Etika Kepemimpinan, Martabat Kepemimpinan Melayu

1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan Melayu didasarkan pada tradisi historis yang terinspirasi dari teladan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta Khulafa al-Rasyidin. Prinsip-prinsip inti seperti musyawarah, tenggang rasa, keadilan, dan kebijaksanaan telah lama menjadi acuan dalam aspek sosial dan politik masyarakat Melayu (Abdurrahim, 2023). Namun, dalam konteks modern, sering timbul permasalahan ketika sebagian pemimpin menerapkan kekuasaan secara otoriter, mengabaikan musyawarah, serta memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kesejahteraan umum. Fenomena ini memicu kritik karena bertentangan dengan fondasi adat dan syariat budaya Melayu, yang tercermin dari penurunan kepercayaan rakyat, konflik sosial, serta degradasi tatanan kehidupan berbangsa (Ellya Roza, dkk., 2022).

Studi-studi terdahulu kerap menyoroti realitas kepemimpinan Melayu dengan menekankan hubungannya pada adat dan syarak sebagai dasar kehidupan masyarakat (Annur & Niswah, 2025). Kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa penyimpangan kekuasaan dari prinsip musyawarah, tenggang rasa, dan keadilan merupakan pengkhianatan terhadap warisan budaya Melayu. Beberapa penelitian juga menekankan dampak sosial seperti perselisihan masyarakat, kerapuhan kepercayaan terhadap pemimpin, dan kerusakan struktur sosial sebagai akibat langsung dari praktik kepemimpinan yang menyimpang dari tradisi (Mustaffa, 2024). Penelitian lain membahas ketegangan antara nilai kepemimpinan tradisional dengan praktik kontemporer yang bersifat pragmatis dan politis. Temuan-temuan ini saling melengkapi dalam memandang kepemimpinan Melayu sebagai sistem nilai yang dinamis, terus diuji oleh evolusi konteks sosial, politik, dan budaya.

Merujuk pada kajian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada praktik nilai kepemimpinan Melayu dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Ruang lingkup mencakup evaluasi sejauh mana adat dan syarak tetap menjadi panduan kepemimpinan, serta analisis konflik antara nilai tradisional dengan praktik modern yang pragmatis (Azizul, 2024). Selain itu, studi ini mengidentifikasi dampak sosial dari pergeseran pola kepemimpinan, seperti erosi kepercayaan masyarakat, konflik, dan kerentanan terhadap perubahan budaya. Metode yang digunakan adalah library research melalui pemeriksaan literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen adat, dan karya ilmiah terkait. Pendekatan ini

diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kontinuitas serta transformasi kepemimpinan Melayu, disertai rekomendasi untuk pelestarian nilai budaya menghadapi tantangan era.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang menekankan penggambaran data secara mendalam, rinci, dan komprehensif untuk merepresentasikan fenomena secara keseluruhan. Data primer terdiri dari teks klasik Tunjuk Ajar Melayu yang membahas konsep kepemimpinan, moralitas, dan legitimasi kekuasaan. Penelitian bersifat studi pustaka, yakni pengumpulan data melalui analisis sumber tertulis seperti buku, jurnal, catatan, dan laporan relevan dengan topik (Nazir, 2013). Dengan demikian, tidak dilakukan pengumpulan data lapangan, melainkan interpretasi literatur yang ada untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai subjek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Budaya Melayu

Etika kepemimpinan dalam tradisi Melayu tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mendasar tentang makna etika itu sendiri, yakni ilmu yang membimbing individu untuk mengenali perbuatan buruk, hak, serta kewajiban moral atau akhlak. Sementara itu, pemimpin dipahami sebagai individu yang memimpin, berasal dari akar kata yang menyiratkan pengarahan terhadap orang lain. Secara umum, kepemimpinan merupakan proses mengarahkan, membimbing, memengaruhi, atau mengendalikan pikiran, perasaan, serta perilaku pihak yang dipimpin. Dalam kepemimpinan Melayu, ilmu diperlukan sebagai fondasi, sedangkan seni diterapkan agar proses kepemimpinan berlangsung harmonis dan penuh empati. Raja Ali Haji dalam karyanya *Samarah al-Muḥimmah* (1858) menguraikan kepemimpinan sebagai konsep tritunggal Melayu-Islam-Khalifah-Sultan-Iman. Khalifah melambangkan kewajiban menegakkan agama berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'; sultan bertanggung jawab menegakkan hukum secara adil sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya; sedangkan iman menuntut pemimpin berada di garis depan sebagai teladan. Dengan memenuhi ketiga elemen ini, pemimpin akan memperoleh hidayah dan inayah ilahi. Dalam budaya Melayu, pemimpin

tidak boleh mencalonkan diri, melainkan dipilih oleh masyarakat, dan selama menjabat tidak boleh menuntut pemujaan. Pepatah Melayu menyatakan bahwa pemimpin hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dan dilebihkan sebarang. Pemimpin berposisi sebagai pelayan atau *kodam* yang dituntut berkontribusi lebih banyak bagi khalayak tanpa mengutamakan kesenangan pribadi. Kemuliaan dicapai melalui kepemimpinan yang adil, dan setiap individu dituntut menjadi pemimpin, minimal dalam rumah tangganya sendiri, dengan perilaku terpuji sesuai ajaran *Tunjuk Ajar Melayu*.

Sistem Kepemimpinan Tradisional di Riau Sebelum Kemerdekaan

Sebelum Indonesia merdeka, sistem kepemimpinan di Riau terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu kerajaan/perbatinan, kedatuan, dan perbatinan. Sistem kerajaan berlaku di wilayah seperti Melaka, Siak, Pelalawan, Rokan, Empat Kota, Gunung Sahilan, dan Inderagiri. Dalam sistem ini, raja atau sultan sebagai pemimpin tertinggi diangkat dari garis keturunan, dibantu oleh pembesar kerajaan. Di Kesultanan Siak, misalnya, dewan kesultanan terdiri dari Datuk Tanah Datar, Datuk 50, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar, dengan dukungan Datuk Bintara Kanan dan Kiri untuk urusan pemerintahan dan hukum, serta Datuk Laksamana untuk urusan laut. Sistem kedatuan bersifat federasi, di mana datuk yang berdaulat membentuk negeri serikat dan memilih pemimpin bersama, seperti pada Kedatuan Muara Takus. Sementara itu, sistem perbatinan merupakan bentuk kepemimpinan purba pra-kerajaan, di mana batin memimpin suku-suku asli seperti Talang Mamak, Bonai, Sakai, Rakit, dan Duonu. Dalam struktur Talang Mamak masa lalu, Sultan Indragiri mengatur hukum kerajaan, patih sebagai menteri suku, batin sebagai pelaksana pemerintahan, monti sebagai pembantu adat, dubalang pelaksana sanksi, penghulu penerima pengaduan, dan dukun untuk kesehatan serta ritual.

Etika Kepemimpinan Melayu: Martabat dalam Empat Dimensi

Penunjukan pemimpin Melayu selalu terkait dengan ketentuan Islam, karena etika kepemimpinan merupakan inti dari kepemimpinan itu sendiri. Pelanggaran terhadap etika akan mengurangi rasa hormat rakyat. Berdasarkan *Tunjuk Ajar Melayu*, etika kepemimpinan Melayu terbagi ke dalam empat martabat, yakni martabat diri, martabat memimpin, martabat orang lain, dan martabat wilayah.

Martabat diri berkaitan erat dengan kepatuhan pada tiga tingkatan hukum, yaitu hukum Allah/Islam, hukum adat, dan hukum manusia/undang-undang. Ketaatan ini menjadi dasar kepribadian; ketidaktaatan berarti tak bermoral dan tidak layak diteladani. Martabat diri juga meliputi keluarga, karena pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau istri dapat merusak martabat pemimpin. Martabat memimpin menuntut pemimpin memahami hakikat kepemimpinan sebagai sarana menyalurkan aspirasi untuk kemaslahatan dan meruntuhkan kebatilan. Kemampuan memimpin secara arif dan bijak menjadi ukuran martabat seorang pemimpin. Martabat orang lain mengharuskan pemimpin menjaga kehormatan pihak yang dipimpin, misalnya dengan menyelesaikan kesalahan tanpa merendahkan secara berlebihan serta mengutamakan nasihat. Pemimpin harus menjadi penyantun yang membimbing dan melindungi demi kesejahteraan lahir dan batin. Martabat wilayah menegaskan bahwa kampung tanpa hutan kehilangan marwahnya; pemimpin wajib mempertahankan wilayah seperti hutan, sungai, dan tanah. Sebagaimana ungkapan *Tunjuk Ajar*: “kalau hendak tahu memimpin sejati, tengoklah ia memimpin negeri.”

Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin Melayu

Syarat menjadi pemimpin dalam tradisi Melayu merujuk pada prinsip-prinsip Islam, yaitu *tabligh*, *fathonah*, *amanah*, dan *siddiq*. Selain itu, *Tunjuk Ajar Melayu* dan *Pemimpin dalam Ungkapan Melayu* karya Tenas Effendi (2014) merinci hingga 55 karakter pemimpin yang dikelompokkan ke dalam empat kategori utama berikut.

Siddiq (jujur dan dapat dipercaya) menjadi fondasi iman. Pemimpin yang *siddiq* akan melahirkan kewibawaan dan integritas sehingga ditaati oleh rakyat. Dalam kategori ini, dikenal pemimpin *amal* yang hidup lurus dan makan halal, pemimpin jantan yang berani membela rakyat dengan hati penuh belas kasih, serta pemimpin jujur yang menjalankan tugas tanpa bohong dan menciptakan negeri sentosa makmur.

Amanah berarti menjaga dan menjalankan kewajiban dengan setia dan teguh. Pemimpin yang *amanah* dicerminkan oleh iman dan takwa, tanggung jawab, serta kejujuran. Sebaliknya, pengingkaran *amanah* menyebabkan kehinaan dan dijauhi masyarakat. Termasuk dalam pemimpin yang *amanah* adalah pemimpin *amal* yang

memberikan manfaat kekal, pemimpin asin yang perkataannya sejalan dengan perbuatan, serta pemimpin asuh yang mengutamakan negeri dan rela berkorban.

Fathonah, cerdas, dan berilmu menuntut pemimpin memiliki kecerdikan, kebijaksanaan, serta wawasan luas. Pemimpin yang cerdik mampu menyelesaikan masalah secara independen berbekal pengalaman dan kecermatan. Pemimpin lurus memiliki tekad kuat memajukan negeri dengan kepahlawanan, sementara pemimpin sabar memiliki kepedulian tinggi, simpati, empati, dan ringan tangan dalam menolong rakyat yang terlantar.

Tabligh atau komunikatif menekankan kemampuan menyampaikan kebenaran dengan tutur kata yang tepat. Keadilan menjadi tiang keutuhan, dan pemimpin dituntut mengayomi tua-muda serta menghilangkan rasa cemburu sosial. Dalam kelompok ini, pemimpin abdi bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pandai menyampaikan pesan dengan mudah dipahami, sedangkan pemimpin acu menjadikan syarak sebagai tumpuan, adat sebagai acuan, undang-undang sebagai penyatu, dan yang tua sebagai guru.

Kriteria Lengkap Pemimpin dan Syarat Pergantian

Berdasarkan *Pemimpin dalam Ungkapan Melayu* (Tenas Effendi, 2012), terdapat tiga belas kriteria pemimpin menurut ungkapan adat, yang seluruhnya disajikan dalam bentuk deskripsi padat. Pemimpin dituntut banyak tahunya, yaitu tahu duduk di tempatnya dan kata berpangkal pokok; banyak tahannya terhadap hujan panas, susah penat, dan lelah; banyak bijaknya dalam mengukur, menimbang, dan memberi kata putus; banyak cerdiknyanya dalam menyusun ikatan adat dan musyawarah; banyak pandainya membaca tanda dan menyimpan budi; banyak arifnyanya dalam memahami tinggi-rendah serta jauh-dekat; mulia budinya dengan tidak memaksa, tidak membodohkan, dan tidak menghambat pangkat; banyak relanya berkorban membela kawan dan hak; banyak ikhlasnya dalam menolong tanpa sanjung dan bekerja tanpa upah; banyak taatnya kepada Allah, janji, amanah, dan musyawarah; mulia duduknya dalam mufakat menjunjung adat; banyak sadarnya bahwa memimpin dan dipimpin adalah satu kesatuan; serta banyak tidaknya, yakni merendah tanpa membuang marwah dan tinggi tanpa membuang budi.

Mengenai pergantian pemimpin, tradisi Melayu tidak mengenal periode formal tetap, melainkan didasarkan pada kesanggupan fisik, kepatutan, kesehatan rohani, dan

usia. Pergantian tidak dilakukan secara sepihak, melainkan demi kepentingan bersama berdasarkan adat. Syarat-syarat pergantian meliputi sakit menahun, melanggar kepatutan atau hukum yang telah disepakati, hilang tidak diketahui rimbanya, atau usia yang telah habis janjinya serta takdir kematian yang tidak dapat ditolak.

4. KESIMPULAN

Konsep kepemimpinan Melayu-Islam di Riau, sebagaimana terdokumentasi dalam sumber tradisional seperti Samarah al-Muḥimmah dan Tunjuk Ajar Melayu, mengintegrasikan triad khalifah-sultan-iman dengan struktur pra-kemerdekaan (kerajaan, kedatuan, perbatinan) yang menekankan pemilihan komunal, pelayanan masyarakat, dan ketaatan hukum. Etika kepemimpinan terstruktur dalam empat martabat (diri, memimpin, orang lain, wilayah), sementara syarat utama bersumber dari prinsip Islam siddiq, amanah, fathonah, tabligh dilengkapi 55 karakteristik (kelompokkan amanah, bijaksana, jujur, komunikatif) serta 13 kriteria ungkapan adat yang menuntut kebijaksanaan, ketabahan, dan pengabdian. Pergantian pemimpin bersifat kondisional berdasarkan ketidakmampuan, menjaga kontinuitas amanah tanpa formalitas temporal, sehingga membentuk model kepemimpinan holistik yang harmonis antara iman, adat, dan kesejahteraan kolektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahim, A. (2023). *Prinsip Permusyawaratan Dalam Islam Dikaitkan Dengan Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Annur, S., & Niswah, C. (2025). PERAN ADAT DAN NILAI DALAM BUDAYA MELAYU BERBASIS ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS SOSIAL DI ERA MASYARAKAT MODEREN. *Jurnal Teori dan Pengembangan Pendidikan*, 9(4).
- Azizul Hakim, A. (2024). *TRANSFORMASI SOSIAL PADA PERCERAIAN: STUDI ANALISIS PADA MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Dewi, G. S., Julhazri, H., Fadeli, M., & Ahyatullah, R. (2026). Membangun Karakter Berbasis Budaya Melayu. *JURNAL PELITA STUDI ISLAM DAN HUMANIORA*, 2(1), 137-144.
- Effendy, T. (2013). *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau)*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

- Elmustian, E., & Fadila, N. (2025). Orang Patut: Konstruksi Identitas dan Kekuasaan dalam Kepemimpinan Melayu Tradisional. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(4), 5200-5206.
- HAJI, P. M. R. A. ETIKA MELAYU: PEMIKIRAN MORAL RAJA ALI HAJI.
- Hartanto, D. (2023). Ragam Kearifan Lokal Budaya Dan Tradisi Lisan.
- Mustaffa, C. S. (2024). *Memartabatkan Nilai Budaya Melayu dalam Komunikasi Melalui Penelitian Empirikal: Satu Perdebatan Tesis, Sintesis dan Antitesis (UUM Press)*. UUM Press.
- Purba, N. (2017). Kearifan lokal budaya malu masyarakat melayu dalam mencegah korupsi.